

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan Umum Perhutani atau yang sering disebut Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Perusahaan Umum Perhutani berdiri pada tahun 1972 tepatnya pada tanggal 29 Maret. Dibuktikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972.

Perusahaan Umum Perhutani mengelola berbagai bidang bisnis diantaranya kayu, non kayu, dan ekowisata. Untuk bidang kayu ada beberapa jenis kayu yang dihasilkan yaitu Jati, Pinus, dan Mahoni dan produk yang dihasilkan berupa kayu bundar (gelondongan). Untuk bidang non kayu menghasilkan hasil industri berupa gondorukem dan minyak kayu putih yang di timbun di drum. Gondorukem adalah olahan dari getah hasil pengambilan pada batang pohon pinus yang teksturnya cairan kental. Gondorukem biasanya digunakan sebagai campuran perona wajah (*eyeshadow*), penguat bulu mata, dan sebagai perekat warna pada industri tinta dan cat. Sedangkan minyak kayu putih diperoleh dari proses ekstraksi atas daun pohon kayu putih dari hutan yang teksturnya seperti minyak kayu putih pada umumnya. Dan untuk bidang ekowisata Perhutani mengelola dan menyediakan berbagai tempat wisata baik wisata hutan, air terjun, pantai dan telaga contohnya wisata air terjun coban rondo yang terletak di Malang.

Untuk penelitian ini hanya meneliti tentang jasa angkutan kayu yang ada di Perum Perhutani KBM (Kesatuan Bisnis Mandiri) Tandes Surabaya yang pengangkutannya dari Tempat Penyimpanan Kayu (TPK) yang berasal dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pemasok, antara lain : KPH Bojonegoro terletak di desa Ledok Wetan, KPH Jatirogo terletak di desa Klangon, KPH Saradan terletak di Jalan Raya Saradan, KPH Malang terletak di Jalan Dr. Sucipto dan di angkut ke Penggergajian Mesin (PGM). Untuk lokasi Penggergajian Mesin antara lain di Ngawi desa Banjarbanggi, Saradan desa Sidorejo, Bojonegoro desa Sukerejo, Jatirogo desa Sumbermulyo, Kediri desa Ngancar, Gresik desa Indro dan sebagainya. UD. Hendry Soesanto yang menjadi mitra untuk kerjasama jasa sewa angkutan di Perum Perhutani KBM Tandes Surabaya. Di setiap Perum Perhutani KBM memiliki angkutan yang berbeda beda contohnya Perum Perhutani KBM Madiun menyewa angkutan dari UD. Kaya Raya. Alasan Perum Perhutani menggunakan UD. Hendry Soesanto karena memiliki kriteria jasa angkutan yang lengkap misalnya tertib administrasi pajak, mempunyai banyak varian armada spesifikasi angkutan kayu, dan sudah lama menjalin kerjasama di lingkupan kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Alasan Perum Perhutani menggunakan jasa sewa angkutan adalah untuk mengurangi kerugian resiko dan penghematan *financial*. Arti dari jasa sewa sendiri adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Dalam menggunakan jasa sewa, perusahaan yang menyewakan jasanya akan dikenakan pajak penghasilan

yang termasuk dalam Pajak Penghasilan pasal 23 dengan tarif sebesar dua persen (2%).

Menurut Rochmat Sumitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2013:1). Sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Jadi, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 antara lain penilai, akuntansi, hukum, arsitektur dll. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Siti Resmi, 2013:303).

Dalam melakukan pembayaran pajak atas sewa angkutan tentunya ada prosedur atau tata cara mulai dari pemotongan, penyetoran hingga pelaporan. Prosedur adalah serangkaian tindakan yang spesifik yang harus dijalankan dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama

dari keadaan yang sama. Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya adalah Subjek Pajak dalam negeri yang mempunyai wewenang untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang pada masa pajak tersebut. Dalam hal ini yang berperan sebagai pemotong adalah Perum Perhutani. Pemotongan pajak yang artinya kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Dalam hal ini pihak pemotong adalah Perum Perhutani karena membayar atas penyewaan kendaraan angkutan terhadap perusahaan yang bekerjasama yaitu UD. Hendry Soesanto. Sedangkan yang menerima penghasilan adalah UD. Hendry Soesanto karena telah menyewakan kendaraannya kepada Perum Perhutani. Penyetoran pajak dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Pajak atau sering disebut SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan seperti Kantor Pos, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BCA. Setelah menyetor kemudian melakukan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak. Fungsi dari SPT sendiri adalah melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan

dari perusahaan dalam jangka waktu satu bulan atau satu tahun. Untuk PPh Pasal 23 menggunakan SPT masa.

Kemungkinan terjadi kekeliruan dalam perhitungan PPh pasal 23 yang dipotong sehingga berdampak terhadap pajak terutang yang dipotong, disetor dan dilaporkan. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sangat diperlukan supaya meminimalisir kekeliruan.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “ **PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 SEWA ANGKUTAN PADA PERUM PERHUTANI SURABAYA** ”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sewa angkutan pada Perum Perhutani Kayu Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain terdapat tujuan studi lapang, di dalam laporan ini juga terdapat manfaat yang bisa diberikan untuk beberapa pihak yang terkait:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sewa angkutan, mulai dari proses awal sampai pelaporan pajak terutangnya di Perum Perhutani Kayu Surabaya, serta untuk menerapkan teori-teori

yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan dan sebagai syarat lulus Program Diploma III.

2. Bagi Akademis

- a. Dapat menambah referensi yang memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan terutama mengenai prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sewa angkutan hasil industri kayu.
- b. Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang ada kaitanya dengan penulisan ini.

3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang diteliti yaitu Perum Perhutani Hasil Industri Kayu Surabaya dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sewa angkutan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Supaya penulisan tugas akhir ini tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan serta fokus terhadap topik yang ingin dibahas, maka penulis hanya membahas tentang prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sewa angkutan pada Perum Perhutani Kayu Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Observasi, Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada Perum Perhutani Kayu Surabaya, serta mengumpulkan data-data mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sewa angkutan hasil industri kayu.
- b) Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan Perum Perhutani Kayu Surabaya dan karyawan yang menangani masalah keuangan dan perpajakan.
- c) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji ulang data pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sewa angkutan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 di Perum Perhutani Kayu Surabaya, sehingga diperoleh manfaat sebagai dasar pengujian data sekaligus langkah-langkah dalam menganalisa data.